

RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2024



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PASAMAN BARAT**

KABUPATEN PASAMAN BARAT

KATA PENGANTAR

Untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka sebagai rangkaian dokumen perencanaan pembangunan daerah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat menyusun Rencana Kerja Tahun 2024 yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2021 s/d 2026.

Rencana Kerja (Renja) merupakan Perencanaan Tahunan dari Rencana Strategis yang berjangka waktu lima tahun. Rencana Kerja memberikan gambaran lebih mendetail tentang sasaran serta program dan kegiatan yang ditetapkan sebagai suatu strategi untuk mencapai sasaran tersebut, sehingga dalam dokumen ini memuat program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran dengan indikator output dan indikator outcom yang akan dicapai.

Dalam penyusunan Renja ini, masukan dan saran tentunya sangat diharapkan untuk dapat lebih menyempurnakan Renja Dinas menuju Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat yang responsive dan aspiratif.

Simpang Empat, Januari 2023

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PASAMAN BARAT**



Hj. YULISNA,SH

NIP. 196507031991022001

DAFTAR ISI

Daftar Isi	i
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	3
BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD	20
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	23
2.4. Telaahan Terhadap Rancangan RKPD	23
2.5. Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat	35
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN	
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	36
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SOPD	36
3.3. Rencana Program dan Kegiatan	37
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	44
BAB V. PENUTUP	55

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi OPD, Renja OPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra OPD yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Rencana Kerja (Renja) OPD disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja OPD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD.

Dokumen Renja OPD pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan OPD. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja OPD sangat ditentukan oleh kemampuan OPD dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi OPD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi

pelaksanaan rencana pembangunan daerah, proses penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD terdiri dari tiga tahapan utama yaitu tahap persiapan penyusunan, tahap penyusunan rancangan, dan tahap penetapan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat. Tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusun RKPD dan Renja OPD, orientasi mengenai RKPD dan Renja OPD, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja OPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja OPD yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Rencana Kerja (Renja) OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.2. Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rancangan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat adalah :

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan; Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penetapan Organisasi Perangkat Daerah;
18. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 38 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
19. Peraturan Bupati Pasaman Barat 26 Tahun 2018 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat disusun dengan maksud untuk menyediakan dokumen perencanaan 1 (satu) tahunan yang memuat program dan kegiatan terukur sebagai dasar untuk penilaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta sebagai perangkat untuk menciptakan perencanaan pembangunan yang sinkron pada Tahun 2024.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.

2. Mengoptimalkan tugas pokok, fungsi dan peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai instansi perumusan kebijakan dan penyusunan program di bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat.

1.4. Sistematika Penulisan

Seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 Pasal 78 ayat (1), maka sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) SOPD adalah sebagai berikut:

BAB 1 : PENDAHULUAN

- 1.1 *Latar Belakang*, Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.
- 1.2 *Landasan Hukum*, Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
- 1.3 *Maksud dan Tujuan*, Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.
- 1.4 *Sistematika Penulisan*, Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

- 2.1 *Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah*, Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun

lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

- 2.2 *Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah*, memuat kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SOPD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.
- 2.3 *Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah*, memuat sejauh mana tingkat kinerja pelayanan OPD dan hal kritis yang terkait; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, dan terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan SOPD dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis.
- 2.4 *Review terhadap Rancangan Awal RKPD*, Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut.
- 2.5 *Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat*, menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari masyarakat, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun berdasarkan pelaksanaan musrenbang.

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1 *Telaahan terhadap Kebijakan Nasional*, memuat penelaahan yang

menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan tugas pokok dan fungsi SOPD.

3.2 *Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah*, didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra OPD.

3.3 *Program dan Kegiatan*, memuat faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, total kebutuhan dana/pagu indikatif, dan penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD.

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V : PENUTUP

Memuat Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, Kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja OPD bertujuan untuk menilai apakah program-program pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan target kinerja OPD yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD. Melalui evaluasi akan diketahui permasalahan atau kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan rencana kerja program pada tahun anggaran berikutnya berdasarkan tolok ukur yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2023, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 4 (Empat) program yang terdiri dari 11 kegiatan. Sementara pada tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat melaksanakan 4 (Empat) program yang didukung oleh 12 kegiatan.

Evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2022 memuat pencapaian target kinerja tahun 2022 berdasarkan rencana kerja sebagaimana telah disusun. Sedangkan, evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2023 memuat perkiraan capaian kinerja pada tahun berjalan, yang kemudian dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun sebelumnya serta yang akan datang.

Adapun informasi yang akan didapatkan melalui evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra OPD; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tahun 2022 serta perkiraan capaian kinerja tahun berjalan (TA 2023) disajikan pada Tabel T-C. 29 di bawah ini :

Tabel T-C.29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2022

Kabupaten Pasaman Barat

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar									
2 12	Administrasi Kependudukan dan Cakil									
2 12 01 2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2 12 01 2 01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	2 Buku/Tahun	75 buku profil dan 150 buku data agregat	75 buku profil dan 150 buku data agregat	75 buku profil dan 150 buku data agregat	100%	-	-	-
2 12 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Buku/Tahun	75 buku profil dan 150 buku data agregat	75 buku profil dan 150 buku data agregat	75 buku profil dan 150 buku data agregat	100%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluasan Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.12.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah PNS yang Menerima Gaji dan Tunjangan	38 Orang	23 Orang	23 Orang	23 Orang	100%	24 Orang	24 Orang	100%
2.12.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jjumlah Non PNS (PTT/THL) Penunjang Administrasi Perkantoran	5 Orang	14 Orang	14 Oorg	14 Orang	100%	5 orang	5 org	100%
2.12.01.2.03.06	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	7 Orang	7 Orang	7 org	7 Orang	100%	7 Orang	7 org	100%
2.12.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada Disdukcapil	100%	100%	10%	100%	100%	100%	100%	100%
2.12.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Orang	2 Orang	2 org	2 Orang	100%	2 Orang	2 org	100%

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 12 01 2 05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14 orang	14 Orang	14 Orang	14 Orang	100%	14 Orang	14 Orang	100%
2 12 01 2 05 10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	14 orang	14 Orang	14 Orang	14 Orang	100%	14 Orang	14 Orang	100%
2 12 01 2 05 11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 orang	16 Orang	16 Orang	16 Orang	100%	10 Orang	10 Orang	100%
2 12 01 2 06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	18%	100%	100%	100%	100%	100%
2 12 01 2 06 01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 paket	5 paket	5 paket	5 paket	100%	-	-	-
5.01.01.2.06.03	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 paket	-	-	-	-	3 Unit	3 Unit	100%
5.01.01.2.06.05	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 paket	-	-	-	-	-	-	-
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	25 laporan	25 laporan	25 laporan	25 laporan	100%	25 laporan	25 laporan	100%
2.12.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	10%	100%	100%	100%	230%	230%
2.12.01.2.07.6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 paket	10 Unit	10 Unit	10 Unit	100%	10 Unit	23 unit	230%

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2.12.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 laporan	500 laporan	500 laporan	500 laporan	100%	500 laporan	500 laporan	100%
2.12.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
2.12.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	12 laporan	12 laporan	100%
2.12.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	630 Unit	618 Unit	618 unit	618 Unit	100%	71 Unit	67 unit	94%

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 Unit	20 Unit	20 unit	20 Unit	100%	21 Unit	17 unit	81%
2.12.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit	44 Unit	44 unit	44 Unit	100%	49 Unit	49 unit	100%
2.12.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitas Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitas	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	1 Unit	100%
2.12.02	Program Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan terkait pendaftaran penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	80%	64%	64%
2.12.02.2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	80%	64%	64%

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.12.02.2.01.1	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	3.750 dokumen	3.750 dokumen	3.750 dokumen	3.750 dokumen	100%	3.750 dokumen	2691 dokumen	72%
2.12.02.2.01.2	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	98.000 dokumen	98.000 dokumen	98.000 dokumen	98.000 dokumen	100%	98.000 dokumen	53.548 dokumen	55%
2.12.02.2.04	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-
2.12.02.2.04.02	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	12 laporan	12 laporan	12 laporan	12 laporan	100%	-	-	-

Kode Rekening	Urusan/ Bidang Urusan pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2020	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2021	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2022	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2 12 03	Program Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan terkait Pencatatan Sipil	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.53%	99.53%
2 12 03 2 01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Pelayanan Pencatatan Sipil terlaksana dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	99.53%	99.53%
2 12 03 2 01 01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	13.051 dokumen	13.051 dokumen	1.3.051 dokumen	13.051 dokumen	100%	13.051 dokumen	12.990 dokumen	99.53%
2 12 04	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen adminduk yang dikelola Jumlah instansi dan lembaga yang memanfaatkan pengolahan dan penyajian data kependudukan Jumlah jaringan adminduk yang dikelola	3 Buku 7 OPD 6 Jaringan	3 Buku 7 OPD 6 Jaringan	3 Buku 7 OPD 6 Jaringan	3 Buku 7 OPD 6 Jaringan	100%	3 Buku 7 OPD 6 Jaringan	2 Buku 6 OPD 6 Jaringan	2 Buku 6 OPD 6 Jaringan

Dari tabel T-C.29 dapat dilihat bahwa semua target program yang terdiri dari 4 (empat) program pada tahun 2022 tercapai 100%. Ke empat program tersebut adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pendaftaran Penduduk, Program Pencatatan Sipil dan Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan.

Secara umum kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menunjukkan keberhasilan, yaitu rata-rata pencapaian realisasi kinerja sebesar 100%. Namun beberapa kegiatan yang telah direncanakan dalam Renstra dan Renja tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran dan dalam pelaksanaannya terdapat kendala-kendala yang cukup berarti sebagai berikut:

1. Adanya beberapa kegiatan yang sudah ditargetkan dalam Renstra dan Renja untuk dilaksanakan di tahun 2023 namun karena anggaran yang tidak memadai kegiatan tersebut tidak dilaksanakan sehingga indikator sasaran kinerja belum tercapai sepenuhnya untuk kegiatan yang dimaksud.
2. Masalah-masalah teknis, diantaranya:
 - a. Sarana dan prasarana pelayanan kurang memadai karena banyak yang rusak baik yang ada di Disdukcapil Kabupaten maupun yang ada di Kantor Camat. Biaya perbaikan dan pengadaan alat sangat terbatas.
 - b. Gangguan jaringan sering terjadi sehingga memperlambat proses pelayanan pengurusan dokumen kependudukan.
 - c. Kurangnya pelatihan-pelatihan bagi SDM Disdukcapil. Hal ini sangat berkaitan dengan peraturan-peraturan yang sering berubah terkait administrasi kependudukan.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat pada masa yang akan datang, perlu strategi untuk pemecahan masalah yang timbul pada saat ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. Melakukan percepatan dalam proses pengesahan RAPBD menjadi APBD.
2. Melakukan percepatan dalam pelaksanaan perubahan anggaran.
3. Melakukan pemetaan dan meningkatkan jumlah dan kualitas SDM SKPD.
4. Secara bertahap melengkapi sarana dan prasarana SKPD.
5. Dalam penyusunan anggaran diupayakan agar mengacu sepenuhnya pada anggaran berbasis kinerja yang berorientasi kepada sasaran, misi dan visi

- daerah, Renstra dan Renja.
6. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan setiap kegiatan.
 7. Lebih teliti dalam menyusun anggaran kegiatan sehingga sinkron antar apa yang dibutuhkan dengan yang dianggarkan, harga antara barang/jasa yang ada di lapangan dengan terdapat di DPA.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada RPJMD tahun 2021-2026, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat mendukung pencapaian sasaran kepala daerah pada misi 1 RPJMD Kabupaten Pasaman Barat. Berdasarkan hal tersebut di atas, ditetapkan 1 (satu) tujuan strategis pembangunan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026, yakni : Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang profesional dan inovatif.

Tabel 2.2.1 (Tabel T-C.30)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pasaman Barat

No	Indikator Sasaran	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>
1	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	% Penurunan Temuan	50%	40%	30%	20%	50%	40%	20%	10%	
		Nilai SAKIP	B	B	B	BB	B	B	B	BB	
		Level Maturitas SPIP	3	3	3	3	3	3	3	3	
2	Terwujudnya Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	83	84,5	85	85,7	83,44	84,5	85	85,7	
		1. Penerbitan KTP-El (dokumen)	35	35	35	35	34.039	15.059	35	35	
		2. Penerbitan KIA (dokumen)	23	23	23	23	23	20.178	23	23	
		3. Penerbitan KK (dokumen)	40	40	40	40	50.859	18.311	45	45	
		4. Penerbitan Dokumen Pindah Datang (dokumen)	2.75	2.75	2.75	2.75	2.75	2.243	2.75	2.75	
		5. Penerbitan Dokumen Adminduk untuk Penduduk Rentan Adminduk (dokumen)	1	1	1	1	1.03	448	1	1	
		6. Laporan Data Penduduk Non Permanen (laporan)	4	4	4	4	4	2	4	4	

No	Indikator Sasaran	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		7. Penerbitan Akta Kelahiran (dokumen)	16	12	12	12	16.626	11.772	12	12	
		8. Penerbitan Akta Kematian (dokumen)	2	1	1	1	1.854	1.189	1.2	1.2	
		9. Penerbitan Akta Perkawinan (dokumen)	80	50	50	50	106	26	50	50	
		10. Penerbitan Akta Perceraian (dokumen)	1	1	1	1	1	3	1	1	
		11. Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan Data dengan OPD/Lembaga (OPD)	10	10	10	10	30	30	32	34	
		12. Integrasi pemanfaatan Data dan Dokumen kependudukan dengan OPD (OPD)	2	5	6	7	3	6	7	8	
		13. Inovasi Pelayanan yang Dikelola (Inovasi Pelayan)	17	20	22	24	17	23	24	25	
		14. Penyusunan Dokumen Penyajian Data Kependudukan (buku dan laporan)	3 dan 12	3 dan 12	3 dan 12	3 dan 12	3 dan 12	2 dan 6	3 dan 12	3 dan 12	
		15. Pengelolaan Jaringan SIAK (jaringan)	6	6	6	6	6	6	6	6	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Pelayanan administrasi kependudukan dari tahun 2016 sampai tahun 2022 di Kabupaten Pasaman Barat menunjukkan perbaikan yang sangat signifikan. Pemerintah Daerah juga melakukan berbagai inovasi untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat dan mempercepat proses pengurusan dokumen kependudukan. Namun demikian, masih ada sejumlah permasalahan yang perlu diantisipasi:

- a) Ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan administrasi kependudukan hingga ke tingkat terendah, yakni nagari. Dengan demikian, masyarakat tidak harus ke Simpang Empat untuk mendapatkan dokumen administrasi kependudukan. Hal ini tentunya akan menghemat banyak waktu, tenaga, dan biaya;
- b) Ketersediaan jaringan telekomunikasi yang memadai hingga ke tingkat nagari. Gangguan jaringan masih kerap menjadi masalah, karena masih ada daerah yang sulit dijangkau oleh jaringan internet. Untuk mengatasi permasalahan ini perlu kerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika;
- c) Penyediaan sistem otomatis (auto-print) bagi layanan administrasi kependudukan tertentu. Layanan auto-print dapat menjadi solusi untuk menghindari kerumunan dan antrian panjang di loket pelayanan. Namun, diperlukan investasi sarana dan prasarana yang cukup besar agar layanan ini tersedia dan dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat. Selain itu, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat diharapkan memastikan ketersediaan program/kegiatan, anggaran, dan data yang akurat untuk mendukung capaian kinerja;
- d) OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama masih sangat rendah. Sampai saat ini, dari 40 organisasi perangkat daerah di Kabupaten Pasaman Barat, baru 3 (7,5%) OPD yang memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama. Pemanfaatan data kependudukan dapat mempercepat pelayanan bagi masyarakat;

2.4 Telaahan Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Pasaman Barat membutuhkan pagu anggaran sebesar **Rp. 4.263.907.532,-** (*Empat milyar*

dua seratus enam puluh tiga juta Sembilan ratus tujuh ribu lima ratus tiga puluh dua rupiah) untuk mencapai target kinerja pada tahun 2024. Pagu dana tersebut diproyeksikan untuk mendukung pelaksanaan-kegiatan dari 4 program (teknis dan rutin) yang direncanakan. Adapun telaahan terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2024 dapat disajikan pada Tabel berikut:

Tabel T-C.31

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2023

Kabupaten Pasaman Barat

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	4,108,924,372	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	4,108,924,372	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	15 Dokumen	36,375,000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah	15 Dokumen	36,375,000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	36,375,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15 Laporan	36,375,000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai	100%	3,002,508,097	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai	100%	3,002,508,097	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah PNS yang Menerima Gaji dan Tunjangan	24 Orang	2,761,054,379	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah PNS yang Menerima Gaji dan Tunjangan	24 Orang	2,761,054,379	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	Pagu Indikatif	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Non PNS (PTT/THL) Penunjang Administrasi Perkantoran	5 orang	155,873,718	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Non PNS (PTT/THL) Penunjang Administrasi Perkantoran	5 orang	155,873,718	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	7 orang	85,580,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Penyediaan honorarium petugas pengelola keuangan	7 orang	85,580,000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada Disdukcapil	100%	15,600,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Terlaksananya penatausahaan barang milik daerah pada Disdukcapil	100%	15,600,000	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 orang	15,600,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 orang	15,600,000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14 orang	57,705,500	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	14 orang	57,705,500	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	Pagu Indikatif	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	63 Paket	24,000,000					24,000,000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	14 orang	39,605,500	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	14 orang	39,605,500	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	18,100,000	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	10 orang	18,100,000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	164,372,556	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	164,372,556	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5,151,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	5,151,000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	Pagu Indikatif	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	38,626,835	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 paket	38,626,835	
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	24,000,000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	24,000,000	
	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	21,244,721	Penyediaan barang cetak dan penggandaan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	21,244,721	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	75,350,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 laporan	75,350,000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemeritahan daerah	100%	71,600,000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemeritahan daerah	100%	71,600,000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	71,600,000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 unit	71,600,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	Pagu Indikatif (Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	271,276,000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	271,276,000	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 laporan	78,500,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	500 laporan	78,500,000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	100,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	100,000,000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	75,000,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	12 laporan	75,000,000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	100%	155,200,000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah barang milik daerah yang dipelihara	100%	155,200,000	

No	Rancangan Awal RKP					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	Pagu Indikatif	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 unit	75,200,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	21 unit	75,200,000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	618 unit	55,000,000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	618 unit	55,000,000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitas	1 unit	25,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Gedung Kantor Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitas	1 unit	25,000,000	
	Program Pendaftaran Penduduk		Persentase kepemilikan dokumen kependudukan terkait pendaftaran penduduk	80%	101,963,219	Program Pendaftaran Penduduk		Persentase kepemilikan dokumen kependudukan terkait pendaftaran penduduk	80%	101,963,219	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	Pagu Indikatif	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Terlaksananya pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	100%	91,963,219	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Terlaksananya pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	100%	91,963,219	
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	3.750 dokumen	56,200,000	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	3.750 dokumen	56,200,000	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	98.000 dokumen	35,763,219	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	98.000 dokumen	35,763,219	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	100%	10,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk	100%	10,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	Pagu Indikatif	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	12 laporan	10,000,000	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	12 laporan	10,000,000	
	Program Pencatatan Sipil		Persentase kepemilikan dokumen kependudukan terkait Pencatatan Sipil	90%	71,100,000	Program Pencatatan Sipil		Persentase kepemilikan dokumen kependudukan terkait Pencatatan Sipil	90%	71,100,000	
	Pelayanan Pencatatan Sipil		Pelayanan Pencatatan Sipil terlaksana dengan baik	100%	36,100,000	Pelayanan Pencatatan Sipil		Pelayanan Pencatatan Sipil terlaksana dengan baik	100%	36,100,000	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	13.051 dokumen	36,100,000	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	13.051 dokumen	36,100,000	
	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Pencatatan Sipil dengan Baik	100%	35,000,000	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terselenggaranya Pencatatan Sipil dengan Baik	100%	35,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	Pagu Indikatif	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatann Sipil	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	12 laporan	35,000,000	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatann Sipil	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah laporan hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	12 laporan	35,000,000	
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah dokumen adminduk yang dikelola Jumlah instansi dan lembaga yang memanfaatkan pengolahan dan penyajian data kependudukan Jumlah jaringan adminduk yang dikelola	3 dokumen , 7 OPD dan 6 jaringan	155,000,000	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah dokumen adminduk yang dikelola Jumlah instansi dan lembaga yang memanfaatkan pengolahan dan penyajian data kependudukan Jumlah jaringan adminduk yang dikelola	3 dokume n, 7 OPD dan 6 jaringan	155,000,000	
	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Terlaksananya pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	1,000,000	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Terlaksananya pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	1,000,000	
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	3 dokumen	10,000,000	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	3 dokume n	10,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian (%)	Pagu Indikatif	
					(Rp.000)					(Rp.000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	145,000,000	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	100%	145,000,000	
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah instansi dan lembaga yang memanfaatkan pengolahan dan penyajian data kependudukan	7 OPD	35,000,000	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Jumlah instansi dan lembaga yang memanfaatkan pengolahan dan penyajian data kependudukan	7 OPD	35,000,000	
	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pemutakhiran Data Kependudukan	11 Kecamatan	110,000,000	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan Dapat Dipertanggungjawabkan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Terlaksananya Pemutakhiran Data Kependudukan	11 Kecamatan	110,000,000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dari Masyarakat

Mengingat tugas pokok dan fungsi DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Kabupaten Pasaman Barat dalam mengkoordinasikan dan mensinergikan program-program pembangunan yang ada di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), maka DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Pasaman Barat tidak memiliki usulan program dari masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

Didalam undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang – undang no. 24 Tahun 2013 mengamanatkan bahwa penyelenggaraan Administrasi Kependudukan diantaranya bertujuan untuk menyediakan data dan informasi Kependudukan secara rasional yang akurat, lengkap, mutakhir sehingga menjadi acuan untuk perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya.

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional telah mendorong terbangunnya database kependudukan yang akurat dan terpercaya dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan secara nasional, dan meningkatnya cakupan pemenuhan dokumen kependudukan seperti kartu keluarga (KK), kartu tanda penduduk elektronik (KTP-el), dan Akta Catatan Sipil yang merupakan salah satu persyaratan pelayanan publik.

Namun dalam pelaksanaan pelayanan tersebut terdapat permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Permasalahan dalam peningkatan pelayanan administrasi kependudukan yaitu belum meratanya persentase penerbitan akte kelahiran bagi anak di setiap daerah, tuntutan kebutuhan layanan pencatatan sipil secara meluas kepada seluruh warga negara, masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mencatatkan peristiwa kependudukan serta sarana prasarana sistem informasi administrasi kependudukan beberapa diantaranya telah memasuki masa *out of product*, *out of service*, dan *out of sale*.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD

Berdasarkan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pembangunan Daerah Kabupaten Pasaman Barat yang telah dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026, maka tujuan yang ingin dicapai dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 adalah seperti tertuang pada tabel berikut:

Tabel T-C.25
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE						
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	% penurunan temuan BPK atas laporan keuangan Disdukcapil			50%	40%	30%	20%	10%	5%	
		Nilai SAKIP Disdukcapil			B	B	B	BB	BB	BB	
		Level Maturitas			2,11	2,35	2,48	2,6	>2,6	>2,6	
		Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	% penurunan temuan BPK atas laporan keuangan Disdukcapil			50%	40%	30%	20%	10%	5%
			Nilai SAKIP Disdukcapil			B	B	B	BB	BB	BB
			Level Maturitas SPIP Disdukcapil			2,11	2,35	2,48	2,6	>2,6	>2,6
2	Peningkatan kualitas Pelayanan Adminduk dan Pencatatan Sipil yang Profesional Akuntabel dan Inovatif	Indeks Kepuasan Masyarakat			83	84,5	85	85,7	85,8	86	
		Terwujudnya pendaftaran penduduk secara optimal	Rasio Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk			100	100	100	100	100	100
			% Penduduk yang Memiliki KK			100	100	100	100	100	100
			% Penduduk Usia >18 Tahun yang memiliki KTP			30	35	40	45	50	60
Terwujudnya pencatatan sipil secara optimal	Rasio Kepemilikan Dokumen Pencatatan Sipil			100	100	100	100	100	100		
	% Penduduk usia <18 Tahun yang mempunyai Akte Kelahiran			100	100	100	100	100	100		
	% Penerbitan Akte			100	100	100	100	100	100		

3.3. Rencana Program dan Kegiatan

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dijalankan, selain menjalankan program rutin, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat selaku koordinator dalam perencanaan pembangunan daerah bertanggung jawab mengkoordinasikan keselarasan program-program pembangunan daerah di seluruh OPD yang berada di bawah lingkup koordinasinya. Secara umum, rencana program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pasaman Barat Tahun 2024 tertuang dalam 4 (empat) program yang akan didukung oleh 16 (Enam belas) kegiatan, seperti terlihat pada tabel berikut:

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025					
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)		
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target			
2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														
2	12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL								4,263,907,532		8,279,355,632				
2	12	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,906,873,889		3,885,342,034			
2	12	01	2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								10,000,000		10,100,000		
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	15 Laporan	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	10,100,000
2	12	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								3,081,634,379		3,052,006,723		
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai	100 %	24 Orang/b ulan	100 %	2,881,054,379	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100 %	2,956,426,723

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 12 01 2.02 02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerinta han daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhi nya kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai		100 %	12 Dokumen	100 %	115,000,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerinta han daerah	100 %	10,000,000
2 12 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah an daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhi nya kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai		100 %	1000 Dokumen	100 %	85,580,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerinta han daerah	100 %	85,580,000
2 12 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah									15,600,000				15,600,000
2 12 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerinta han daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksanan ya penatausahaan barang milik daerah pada Disdukcapil		100 %	2 Laporan	100 %	15,600,000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayana n penunjan g urusan pemerinta han daerah	100 %	15,600,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	12	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							75,010,000			75,760,000				
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	63 Paket	100 %	24,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	100 %	24,240,000
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	14 Orang	100 %	40,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	100 %	40,501,000
2	12	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	5 Orang	100 %	10,910,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	100 %	11,019,100
2	12	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah							250,359,510			252,863,111				
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	1 Paket	100 %	5,151,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5,202,510

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif(Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.12.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	4 Paket	100 %	145,309,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	146,762,399
2.12.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	1 Paket	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1,010,000
2.12.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	1 Paket	100 %	12,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	12,221,000
2.12.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	24 Laporan	100 %	78,879,210	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	79,668,002

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	12	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran		100%	12 Dokumen	100%	7,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	7,999,200
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							50,050,000				50,550,500		
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	6 Unit	100 %	39,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	39,440,500
2	12	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	1 Unit	100 %	11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	11,110,000
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							261,500,000				264,115,000		
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	500 Laporan	100 %	76,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	77,265,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 12 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	12 Laporan	100 %	110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	111,100,000
2 12 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	12 Laporan	100 %	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	75,750,000
2 12 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								162,720,000					164,347,200
2 12 01 2.09 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	21 Unit	100 %	82,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	83,547,200
2 12 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	618 Unit	100 %	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	55,550,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
212012.0909	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemeritahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Cakupan pelayanan penunjang pemeritahan daerah		100 %	1 Unit	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemeritahan daerah	100 %	25,250,000
21202		PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK						159,796,142					683,693,325	
21202	2.01	Pelayanan Pendaftaran Penduduk						111,400,000					480,193,000	
212022.0101	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan terkait pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Terlaksananya pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk		100 %	3750 Dokumen	100 %	56,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kepemilikan dokumen kependudukan anterkait pendaftaran penduduk	100 %	196,500,000
212022.0102	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan terkait pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Terlaksananya pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk		100 %	98000 Dokumen	100 %	55,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kepemilikan dokumen kependudukan anterkait pendaftaran penduduk	100 %	283,693,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2.12.02.2.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk								48,396,142					203,500,325
2.12.02.2.03.02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	"Rasio kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk yang memiliki KK % penduduk usia > 18 th yang memiliki KTP % Kepemilikan KIA "	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Cakupan kepemilikan KTP Elektronik		100 %	12 Dokumen	95 %	45,396,142	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kepemilikan dokumen kependudukan terkait pendaftaran penduduk	100 %	203,500,325
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL								71,100,000					82,307,138
2.12.03.2.01	Pelayanan Pencatatan Sipil								36,100,000					39,710,000
2.12.03.2.01.01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan anterkait Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pelayanan Pencatatan Sipil terlaksana dengan baik		100 %	13051 Dokumen	100 %	36,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kepemilikan dokumen kependudukan anterkait Pencatatan Sipil	100 %	39,710,000
2.12.03.2.02	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil								35,000,000					42,597,138
2.12.03.2.02.04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan anterkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Terselenggaranya pencatatan sipil dengan baik		100 %	12 Laporan	100 %	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase kepemilikan dokumen kependudukan anterkait Pencatatan Sipil	100 %	42,597,138

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 12 04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN							56,500,000				58,825,000	
2 12 04 2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan							11,000,000				11,550,000	
2 12 04 2.01 01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah dokumen adminduk yang dikelola Jumlah instansi dan lembaga yang memanfaatkan pengolahan dan penyajian data kependudukan Jumlah jaringan adminduk yang dikelola	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Terlaksananya pengelolaan informasi administrasi kependudukan		3 Buku 7 OPD 6 Jaringan	3 Dokumen	100 %	11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah dokumen adminduk yang dikelola Jumlah instansi dan lembaga yang memanfaatkan pengolahan dan penyajian data kependudukan Jumlah jaringan adminduk yang dikelola	3 Buku 7 OPD 6 Jaringan	11,550,000
2 12 04 2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							35,500,000				37,275,000	
2 12 04 2.03 04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah instansi dan lembaga yang memanfaatkan pengolahan dan penyajian data kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan Jumlah Instansi/Lembaga yang Memanfaatkan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan		7 OPD	3 Dokumen 7 OPD	100 %	35,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah instansi dan lembaga yang memanfaatkan pengolahan dan penyajian data kependudukan	7 OPD	37,275,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2 12 04 2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						10,000,000					10,000,000	
2 12 04 2.04 01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah instansi dan lembaga yang memanfaatkan pengolahan dan penyajian data kependudukan	Jumlah instansi yang memiliki PKS dan akses pemanfaatan data adminduk	Persentase instansi pemerintah pemanfaat data administrasi kependudukan		20 OPD	20 OPD	100 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah instansi dan lembaga yang memanfaatkan pengolahan penyajian data kependudukan	20 OPD	10,000,000
2 12 05		Program Pengelolaan Profil Kependudukan						72,637,501					150,000,004	
2 12 05 2.01		Penyusunan Profil Kependudukan						72,637,501					150,000,004	
2 12 05 2.01 02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Ketersediaan profil dan agregat data kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang tersusun	Terlaksananya penyusunan profil kependudukan		2 Buku/Tahun	12 Dokumen	100 %	72,637,501	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Jumlah instansi dan lembaga yang memanfaatkan pengolahan penyajian data kependudukan	20 OPD	150,000,004

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2024. Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang termuat dalam Rencana Kerja akan sangat bergantung kepada komitmen dan kerjasama semua pihak yang terkait. Diperlukan sinergitas antar semua pihak dalam pencapaian tujuan, program dan kegiatan yang telah direncanakan.

Penyusunan Renja sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan perumusan rencana program untuk pembangunan 1 tahun kedepan. Selain sebagai kontrol terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, juga menjadi pedoman dalam pelaksanaan evaluasi dan pelaporan OPD pada akhir tahun anggaran.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat

Tahun 2024

Unit Organisasi : DisdukCapil

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Induktif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2					Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
2	12	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K OTA	Persentase pelayanan penunjang pemerintah daerah				100%			3.906.873.889	
2	12	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah							10.000.000		
2	12	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah an daerah	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Cappaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah an daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	15 Laporan	100%	10.000.000	DAU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Induktif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	12	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3.081.634.379		
2	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan an daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhi ya kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	24 Orang/bulan	100%	2.881.054.379	DAU
2	12	01	2.02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanakan Tugas ASN	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan an daerah	Jumlah Dokumen Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terpenuhi ya kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Dokumen	100%	115.000.000	DAU
2	12	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan an daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terpenuhi ya kebutuhan gaji dan tunjangan pegawai	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1000 Dokumen	100%	85.580.000	DAU
2	12	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah							15,600,000		
2	12	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan an daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksanan ya penatausahaan barang milik daerah pada Disdukcapil	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	2 Laporan	100%	15,600,000	DAU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Induktif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	12	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					75.010.000				
2	12	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	63 Paket	100%	24.000.000	DAU
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	14 Orang	100%	40.100.000	DAU
2	12	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	5 Orang	100%	10.910.000	DAU
2	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					250.359.510				
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	100%	5.151.000	DAU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Induktif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan an daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	4 Paket	100%	145.309.300	DAU
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan an daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	100%	1.000.000	DAU
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan an daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Paket	100%	12.100.000	DAU
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan an daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	24 Laporan	100%	78.879.210	DAU
2	12	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan an daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pada SKPD	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Dokumen	100%	7.920.000	DAU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Induktif (Rp.)	Sumber Dana
										Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								50.050.000	
5	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	6 Unit	100%	39.050.000	DAU
2	12	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Unit	100%	11.000.000	DAU
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								261.500.000	
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	500 Laporan	100%	76.500.000	DAU
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	100%	110,000,000	DAU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Induktif (Rp.)	Sumber Dana
2	12	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan an daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan penunjang urusan pemerintahan an daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	12 Laporan	100%	75.000.000	DAU
2	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							162.720.000		
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan an daerah	Jumlah kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan an daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	21 Unit	100%	82.720.000	DAU
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan an daerah	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang Dipelihara	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan an daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	618 Unit	100%	55.000.000	DAU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Induktif (Rp.)	Sumber Dana
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan an daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dire habilitas	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan an daerah	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	1 Unit	100%	25.000.000	DAU
2	12	02			Program Pendaftaran Penduduk	Kepemilikan dokumen kependudukan masyarakat terkait pendaftaran penduduk						80%	159.796.142	
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran penduduk							111.400.000		
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Presentase kepemilikan dokumen kependudukan terkait pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	terlaksananya Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	3750 Dokumen	100%	56.200.000	DAU
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Presentase kepemilikan dokumen kependudukan terkait pendaftaran penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokuemn Atas Pendaftaran Penduduk	terlaksananya Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pendaftaran penduduk	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100%	98000 Dokumen	100%	55.200.000	DAU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Induktif (Rp.)	Sumber Dana
2	12	02	2.03		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk								10.000.000	DAU
2	12	02	2.03	02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	"Rasio kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk yang memiliki KK % Penduduk usia > 18 th yg memiliki KTP % Kepemilikan KIA"	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Cakupan Kepemilikan KTP Elektronik	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100% 100% 45%	12 Dokumen	95%	45.396.142	DAU
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Rasio kepemilikan dokumen kependudukan				100%			71.100.000	
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil							36.100.000		
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, penatausahaan dan penerbitan dokumen atas pelaporan peristiwa penting	Presentase kepemilikan dokumen kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pelayanan Pencatatan Sipil terlaksana dengan baik	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	13051 Dokumen	100%	36.100.000	DAU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Induktif (Rp.)	Sumber Dana
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil								35.000.000	DAU
2	12	03	2.02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Presentase kepemilikan dokumen kependudukan terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Terselenggaranya pencatatan sipil dengan baik	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 Laporan	100 %	35.000.000	DAU
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Jumlah instansi yang memiliki PKS dan akses pemanfaatan data adminduk					15 OPD	56.500.000		
2	12	04	2.01		Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian data base kependudukan							11.000.000		
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan penyajian data kependudukan	Jumlah dokumen adminduk yang dikelola Jumlah instansi dan lembaga yang memanfaatkan pengolahan dan penyajian data kependudukan Jumlah jaringan adminduk yang dikelola	Jumlah Dokumen data kependudukan yang diolah dan disajikan	Terlaksananya pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	3 Buku 7 OPD 6 Jaringan	3 Dokumen	100%	11.000.000	DAU

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Induktif (Rp.)	Sumber Dana
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan								35.500.000	DAU
2	12	02	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah instansi dan lembaga yang memanfaatkan pengolahan dan penyajian data kependudukan	Jumlah Dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan Jumlah Instansi/Lembaga yang Memanfaatkan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 OPD	3 Dokumen 7 OPD	100%	35.500,000	DAU
2	12	04	2.03	08	Penyajian Data Kependudukan yang Akurat dan dapat Dipertanggungjawabkan	Jumlah Instansi dan lembaga yang memanfaatkan pengolahan dan penyajian data kependudukan	Terlaksananya pemukhtahiran data kependudukan	Terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan	Kab. Pasaman Barat, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	7 OPD	11 Kecamatan	100%	110.000.000	DAU
TOTAL													4.263.907.532	

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 ini merupakan kegiatan, program dan sasaran tahunan dalam rangka mencapai tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026. Pada dasarnya Rencana Kerja Tahun 2024 mengurai target kinerja yang hendak dicapai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Tahun 2024 mencakup 16 kegiatan dalam 4 program untuk mencapai 2 sasaran dan 1 tujuan. Namun demikian kegiatan yang ada telah disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta dinamika yang berkembang dalam masyarakat, dan juga menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Dengan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2024 ini diharapkan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam rangka mendukung tercapainya masyarakat Pasaman Barat yang sejahtera, demokratis dan agamis.

Simpang Empat, 20 Maret 2023
Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Pasaman Barat



Hj. YULISNA, SH

NIP. 19650703 199102 2 001



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR : 100.3.3.2/138/BUP-PASBAR/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASAMAN BARAT
TAHUN 2021-2026

BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyebutkan persiapan penyusunan Rencana Strategis diawali dengan Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dnas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 perlu dibentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;

12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2010-2030;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 18 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011-2031;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

A. Ketua

1. Mengoordinasikan dan mengintegrasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026; dan
2. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas setiap kelompok kerja dalam penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.

B. Sekretaris

1. Mengoordinasikan penyiapan dan pendokumentasian administrasi dalam pelaksanaan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;
2. Melakukan koordinasi dengan kelompok kerja masing-masing bidang dalam rangka pelaksanaan rapat koordinasi;
3. Menyusun agenda kerja Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026; dan
4. Melaksanakan pembahasan bersama dalam rangka menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026.

C. Kelompok Kerja

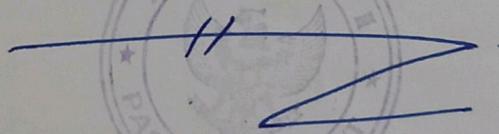
1. Mengidentifikasi seluruh regulasi, pedoman dan petunjuk teknis serta dokumen lainnya yang terkait dengan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;
2. Menganalisa dan mengevaluasi realisasi capaian kinerja Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2016-2021;
3. Mengidentifikasi dan merumuskan isu-isu strategis penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat sesuai visi dan misi serta sasaran kepala daerah yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kabupaten Pasaman Barat;
4. Melaksanakan pembahasan identifikasi penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
5. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan perubahan tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026;
6. Merumuskan perubahan indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat;
7. Melaksanakan sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan;

8. Mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengolah data yang dibutuhkan dalam penyusunan dokumen Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat 2021-2026;
9. Melaksanakan pembahasan untuk memperoleh masukan dari pihak terkait lainnya untuk penyempurnaan Perubahan Rencana Strategis;
10. Melaksanakan seluruh tahapan dalam penyusunan dokumen lengkap Perubahan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 dan;
11. Melaporkan pelaksanaan seluruh tahapan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2021-2026 kepada Bupati.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 3/ Januari 2023

BUPATI PASAMAN BARAT



HAMSUARDI

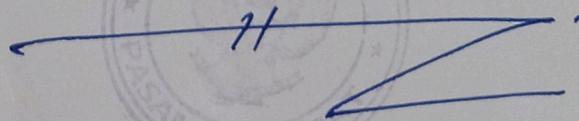
Lampiran 1 Keputusan Bupati Pasaman Barat
Nomor : 100.3.3.2/133/BUP-PASBAR/2023
Tanggal : 31 Januari 2023
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2021-2026

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2021-2026

Jabatan Dalam Tim	Nama	Jabatan
Penanggung Jawab	Hj. Yulisna, S.H	Kepala Dinas
Ketua	Renita, S.Pd.MM	Sekretaris
Sekretaris	Ainul Qolbi, SP, M.CIO	Kasubag Perencanaan
Anggota	Muhammad Irfan, S.S	Kabid PIAK
Anggota	Harisantoni, SE	Kabid DAFDUK
Anggota	Ide Syukroni, SH	Kabid YANPIL
Anggota	Guifa Heri, SS	Kabid PDIP
Anggota	Gitra Wati, Amd	Kasubag Umum
Sekretariat	Nela Agustin, S.Kom	Staff

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal 31 Januari 2023

BUPATI PASAMAN BARAT



HAMSUARDI

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2024**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	12	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100 %	5 Orang	100 %	10,910,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	11,019,100
2	12	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah					250,359,510				252,863,111				
2	12	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	1 Paket	100 %	5,151,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	5,202,510
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	1 Paket	100 %	145,309,300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	146,762,399
2	12	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	1 Paket	100 %	1,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	1,010,000
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	1 Paket	100 %	12,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	12,221,000
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	240 Laporan	100 %	78,879,210	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	79,668,002
2	12	01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase pelayanan kebutuhan administrasi perkantoran		100 %	12 Dokumen	100 %	7,920,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	7,999,200
2	12	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah					50,050,000				50,550,500				
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	2 Unit	100 %	39,050,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	39,440,500
2	12	01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah		100 %	1 Unit	100 %	11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	11,110,000
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					261,500,000				264,115,000				

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2024**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025							
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target					
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	500 Laporan	100 %	76,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	77,265,000
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	12 Laporan	100 %	110,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	111,100,000
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya penyediaan jasa pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	12 Laporan	100 %	75,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	75,750,000
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							162,720,000					164,347,200	
2	12	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	17 Unit	100 %	82,720,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	83,547,200
2	12	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	58 Unit	100 %	55,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	55,550,000
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah		100 %	3 Unit	100 %	25,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Cakupan pelayanan penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	25,250,000
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK							156,796,142					683,693,325	
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk							111,400,000					480,193,000	
2	12	02	2.01	01	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	"Rasio kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk % penduduk yang memiliki KK % penduduk usia > 18 th yang memiliki KTP % Kepemilikan KIA "	Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Rasio pencapaian target kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk (KK,KTP,KIA)		100 100 35 %	1000 Dokumen	11 Kecamatan	56,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		"Rasio kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk % penduduk yang memiliki KK % penduduk usia > 18 th yang memiliki KTP % Kepemilikan KIA "	100 100 35 %	196,500,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2024**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	"Rasio kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk % penduduk yang memiliki KK % penduduk usia > 18 th yang memiliki KTP % Kepemilikan KIA "	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Rasio pencapaian target kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk (KK,KTP,KIA)		100 100 35 %	98000 Dokumen	11 Kecamatan	55,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	"Rasio kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk % penduduk yang memiliki KK % penduduk usia > 18 th yang memiliki KTP % Kepemilikan KIA "	100 100 35 %	283,693,000
2	12	02	2.03		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk												203,500,325
2	12	02	2.03	02	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	"Rasio kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk % penduduk yang memiliki KK % penduduk usia > 18 th yang memiliki KTP % Kepemilikan KIA "	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pendaftaran Penduduk	Cakupan kepemilikan KTP Elektronik		100 100 45 %	12 Dokumen	95 %	45,396,142	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	"Rasio kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk % penduduk yang memiliki KK % penduduk usia > 18 th yang memiliki KTP % Kepemilikan KIA "	100 100 45 %	203,500,325
2	12	03			PROGRAM PENCATATAN SIPIL												82,307,138
2	12	03	2.01		Pelayanan Pencatatan Sipil												39,710,000
2	12	03	2.01	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	"Rasio kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil % penduduk usia <18 th yang mempunyai akte kelahiran % penerbitan akta kematian % penerbitan akta perceraian	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Pelayanan Pencatatan Sipil terlaksana dengan baik		100 %	13051 Dokumen	100 %	36,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	"Rasio kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil % penduduk usia <18 th yang mempunyai akte kelahiran % penerbitan akta kematian % penerbitan akta perceraian	100 %	39,710,000
2	12	03	2.02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil												42,597,138
2	12	03	2.02	04	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	"Rasio kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil % penduduk usia <18 th yang mempunyai akte kelahiran % penerbitan akta kematian % penerbitan akta perceraian	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Cakupan kepemilikan dokumen kependudukan terkait peristiwa penting		100 %	12 Laporan	11 Kecamatan	35,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	"Rasio kepemilikan dokumen Pencatatan Sipil % penduduk usia <18 th yang mempunyai akte kelahiran % penerbitan akta kematian % penerbitan akta perceraian	100 %	42,597,138
2	12	04			PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN												58,825,000
2	12	04	2.01		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan												11,550,000

**Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Pasaman Barat
Tahun 2024**

Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Sub Unit Organisasi : 2.12.0.00.0.00.01.0000 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2024					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025						
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target				
2	12	04	2.01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah instansi yang memiliki PKS dan akses pemanfaatan data adminduk	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Terlaksananya pengelolaan informasi administrasi kependudukan		10 OPD	3 Dokumen	100 %	11,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah instansi yang memiliki PKS dan akses pemanfaatan data adminduk	10 OPD	11,550,000
2	12	04	2.03		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					35,500,000				37,275,000			
2	12	04	2.03	04	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah instansi yang memiliki PKS dan akses pemanfaatan data adminduk	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Terlaksananya penyelenggaraan pengelolaan informasi administrasi kependudukan		10 OPD	10 Dokumen	100 %	35,500,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah instansi yang memiliki PKS dan akses pemanfaatan data adminduk	10 OPD	37,275,000
2	12	04	2.04		Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan					10,000,000				10,000,000			
2	12	04	2.04	01	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah instansi yang memiliki PKS dan akses pemanfaatan data adminduk		Persentase instansi pemerintah pemanfaat data administrasi kependudukan	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	20 OPD		71 %	10,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Jumlah instansi yang memiliki PKS dan akses pemanfaatan data adminduk	20 OPD	10,000,000
2	12	05			PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					72,637,501				150,000,004			
2	12	05	2.01		Penyusunan Profil Kependudukan					72,637,501				150,000,004			
2	12	05	2.01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	Ketersediaan profil dan agregat data kependudukan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain yang disusun	Terlaksananya penyusunan profil kependudukan		2 Buku/Tahun	12 Dokumen	100 %	72,637,501	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Ketersediaan profil dan agregat data kependudukan	2 Buku/Tahun	150,000,004
TOTAL												4,263,907,532				4,860,168,101	